# PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagaian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh:

**MITA RIZKI AMALIA** 

NPM: 1601120164

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG 2020

# UNIVERSITAS TRIDINANTI FAKULTAS EKONOMI PALEMBANG

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: MITA RIZKI AMALIA

Nomor Pokok /NIM

: 1601120164

Jurusan /Prog. Studi

: Akuptansi / Ekonomi

Jenjang Pendidikan

: Strata 1

Mata Kuliah Pokok

: Sistem Pengendalian Manajemen

Judul Skripsi

: Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern

dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin

Pembimbing Skripsi

Tanggal 14 - 10 - 2000

Pembimbing 1:

Rusmida Jun Harapan H, SE, M.Si

NIDN: 0230066801

Tanggal 4/10 - 2020

Pembimbing II:

Ernawati, SE, MM. Ak.CA

NIDN: 0227095902

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Mikial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS

NIDN: 0205026401

.

# Motto:

"Cobalah untuk memaafkan kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain.

Karna terkadang hal yang menurut kita salah belum tentu salah menurut orang lain berusahalah untuk memahami tentang itu"

# Kupersembahkan kepada:

- \* Ayah dan Bunda tercinta
- \* Seluruh keluargaku tersayang
- \* Sahabat dan temanku tersayang
- \* Para Pendidik UTP yang terhormat

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin" dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan ini ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah mendidik, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Rusmida Jun Harapan H, SE, M.Si dan ibu Ernawati, SE, MM. Ak. CA yang telah membimbing dan memberikan arahan, masukan, dan pemahaman dengan tulus yang sangat membatu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Dengan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P. selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
- 2. Ibu Dr. Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.

- Ibu Meti Zuliyana, SE. M.Si. Ak. CA, selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
- Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Musi Banyuasin dan para Staff yang telah mengizinkan dan memberi data serta bantuan kepada penulis saat melakukan penelitian.
- Mama dan semua keluarga besar broyot Huzairin, yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik.
- Sahabat dan teman teman yang telah memberikan semangat, dukungan dan doanya.
- 8. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus semoga amal baik yang dilakukan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Palembang, 1 September 2020 Penulis.

Mita Rizki Amalia

# **DAFTAR ISI**

TTAT ARE		Hala	
HALAMA	AN JUI	DUL	1
HALAMA	AN PE	RSETUJUAN	ii
HALAMA	AN MO	OTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PE	ENGAI	NTAR	iv
DAFTAR	ISI		vi
DAFTAR	TABE	EL	xi
DAFTAR	GAM	BAR	xii
DAFTAR	LAMI	PIRAN	xii
ABSTRA	K		xiv
RIWAYA	T HID	OUP	xv
PERNYA	TAAN	BEBAS PLAGIAT	xvi
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Rumusan Masalah	7
	1.3.	Tujuan Penelitian	7
	1.4.	Manfaat Penelitian	8
BAB II	TIN	JAUAN PUSTAKA	
	2.1.	Kajian Teoritis	9
		2.1.1. Sistem Pengendalian Intern	9

	2.1.1.1.	Pengertian Sistem Pengendalian Intern	9
	2.1.1.2.	Tujuan Pengendalian Intern	10
	2.1.1.3.	Unsur – Unsur Pengendalian Intern	12
	2.1.1.4.	Prinsip Pengendalian Intern	13
	2.1.1.5.	Karakteristik Pengendalian Intern	14
,	2.1.2. Standa	r Akuntansi Pemerintahan	17
	2.1.2.1.	Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	17
	2.1.2.2.	Dasar Hukum Standar Akuntansi Pemerintahan	18
	2.1.2.3.	Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan	18
	2.1.2.4.	Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Menurut Standar	
		Akuntansi Pemerintahan (SAP)	20
,	2.1.3. Kualita	as Laporan Keuangan	24
	2.1.3.1.	Pengertian Laporan Keuangan	24
	2.1.3.2.	Tujuan Laporan Keuangan	25
	2.1.3.3.	Jenis-jenis Laporan Keuangan	26
	2.1.3.4.	Karakteristik Laporan Keuangan	27
	2.1.3.5.	Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan.	29
	2.1.3.6.	Sifat Laporan Keuangan	32
2.2.	Penelitian L	ain Yang Relevan	33
2.3.	Kerangka B	erpikir	37
2.4.	Hipotesis		38

# **BAB III** METODE PENELITIAN

3.1.	Tempat dan Waktu	39
	3.1.1. Tempat Penelitian	39
	3.1.2. Waktu Penelitian	39
3.2.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	39
	3.2.1. Sumber Dana	39
	3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	40
3.3.	Populasi, Sampel, dan Sampling	43
	3.3.1. Populasi	43
	3.3.2. Sampel	44
	3.3.3. Sampling	44
3.4.	Rancangan Penelitan	45
3.5.	Variabel dan Definisi Operasional	46
3.6.	Instrument Penelitian	48
	3.6.1. Pengujian Validitas Instrumen	49
	3.6.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen	50
3.7.	Teknik Analisis	51
	4.1.1. Pengujian Prasyarat Analisis	52
	4.1.1.1 Pengujian Normalitas Data	51
	4.1.1.2. Pengujian Asumsi Klasik	53
	4.1.2. Pengujian Regresi Linier Berganda	55
	4.1.3. Penguijan Koefisien Determinan	56

		4.1.4.	Pengujian Hipotesis	56
			3.7.4.1. Pengujian Hipotesis t	57
			3.7.4.2. Pengujian Hipotesis F	58
	3.8.	Sister	natika Penulis	59
	3.9.	Langl	xah dan Jadwal Kerja	59
		3.9.1.	Langkah Kerja	60
		3.9.2.	Jadwal Kerja	61
BAB IV	HASII	L PENE	ELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	5.1.	Hasil l	Penelitian	62
		4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	62
			4.1.1.1. Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	62
			4.1.1.2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan	
			Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	64
			4.1.1.3. Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan dan	
			Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	65
			4.1.1.4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	68
	4.2.	Pemba	ıhasan	73
		4.2.1.	Analisis Data	73
			4.2.1.1 Deskripsi Data Hasil Jawahan Responden	73

			4.2.1.2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	
			Instrumen Penelitian	83
			4.2.1.3. Hasil Pengujian Normalitas Data	89
			4.2.1.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	90
			4.2.1.5. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda dan	
			Pengujian Hipotesis t	93
			4.2.1.6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi dan	
			Pengujian Hipotesis F	97
		4.2.2.	Interpretasi	99
			4.2.2.1. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian	
			Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	
			pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
			Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	100
			4.2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi	
			Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan	
			Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan	
			dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 1	101
BAB V	HASIL	PENEI	LITIAN DAN PEMBAHASAN	
	5.1.	Kesim	pulan	103
	5.2.	Saran		104
DAFTA	R PUSTA	<b>AKA</b>		105
LAMPII	RAN			108

# **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halama	an
1.1.	Perkembangan LKPD Kabupaten Musi Banyuasin	5
2.1.	Hasil Penelitian Lain yang Relevan	34
3.1.	Variabel dan Defenisi Operasional	46
3.2.	Jadwal Kerja	61
4.1.	Karakteristik Responden	73
4.2.	Deskripsi Data pada Sistem Pengendalian Intern $(X_1)$	75
4.3.	Deskripsi Data pada Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	77
4.4.	Deskripsi Data pada Kualitas Laporan Keuangan (Y)	80
4.5.	Hasil Pengujian Validitas pada Sistem Pengendalian Intern $(X_1)$	83
4.6.	Hasil Pengujian Validitas pada Standar Akuntansi Pemerintah $(X_2)$	84
4.7.	Hasil Pengujian Validitas pada Kualitas Laporan Keuangan (Y)	85
4.8.	Hasil Pengujian Reliabilitas pada Sistem Pengendalian Intern $(X_1)$	86
4.9.	Hasil Pengujian Reliabilitas pada Standar Akuntansi Pemerintah $(X_2) \dots$	87
4.10.	Hasil Pengujian Reliabilitas pada Kualitas Laporan Keuangan (Y)	88
4.11.	Hasil Uji Normalitas Data	89
4.12.	Hasil Uji Multikolinieritas	91
4.13.	Hasil Uji Regresi Berganda dan Hipotesis t	93
4.14.	Hasil Uji Koefisien Derteminan	97
4.15.	Hasil Uji Hipotesis F	98

# DAFTAR GAMBAR

Gambar	aman
Kerangka Berpikir	38
4.1. Struktur Organisasi	69
4.2. Grafik Uji Normalitas	90
4.3. Grafik Uji Heteroskesdatisitas	92
4.4. Kurva Uji $t$ : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern $(X_1)$ secara parsial ten	hadap
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	95
4.5. Kurva Uji t : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X2) secara parsial	
terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)	96
4.6. Kurva Uji F	99

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lamp	piran Halam	an
1.	Kuesioner	108
2.	Karakteristik Responden	115
3.	Hasil Jawaban pada Variabel Sistem Pengendalian Intern $(X_1)$	116
4.	Hasil Jawaban pada Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan $(X_2)$	117
5.	Hasil Jawaban pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	118
6.	Frekuensi Data Karakteristik Responden	119
7.	Frekuensi Data pada Variabel Sistem Pengendalian Intern $(X_1)$	120
8.	Frekuensi Data pada Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan $(X_2)$	123
9.	Frekuensi Data pada Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	128
10.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Variabel Sistem Pengendalian	
	Intern (X <sub>1</sub> )	131
11.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Variabel Standar Akuntansi	
	Pemerintahan (X <sub>2</sub> )	132
12.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Variabel Kualitas Laporan	
	Keuangan (Y)	113
13.	Hasil Uji Normalitas Metode Kolmogorov-smirnov dan Metode Grafik	134
14.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	135
15.	Nilai R Tabel	138
16.	Nilai F Tabel	139
17.	Nilai T Tabel	140

#### **ABSTRAK**

MITA RIZKI AMALIA. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (Dibawah bimbingan Ibu Rusmida Jun Harapan H, SE, M.Si dan Ibu Ernawati, SE, MM. Ak. CA)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memiliki kualitas yang baik untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik pemerintah daerah harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah di tetapkan pada Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial maupun secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, ada pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Kedua*, ada pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Ketiga*, Ada Pengaruh signifikan antara Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Kualitas laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Aplikasi penelitian ini bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasi, diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerapkan Peraturan Pemerintahan yang ada Indonesia dalam hal membuat/menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga dapat menjadi Pemerintahan yang baik (*good Govermance*).

#### RIWAYAT HIDUP

MITA RIZKI AMALIA, dilahirkan di Sekayu pada tanggal 14 Mei 1999 anak tunggal dari Bapak Senen Jauhari dan Ibu Novi Yanti.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 7 Sekayu, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2013 di SMP Negeri 1 Sekayu dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016 di SMA Negeri 1 sekayu, Pada Tahun 2016, langsung melanjutkan Pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, 1 September 2020 Penulis,

Mita Rizki Amalia

### PETNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Mita Rizki Amalia

Nomor Pokok

: 1601120164

**Fakultas** 

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 1 September 2020

Penulis,

Mita Rizki Amalia

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap negara pasti memerlukan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Nopianti, 2017). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan dalam kerangka konseptual, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Standar Akuntasi Pemerintah awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukan hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Lebih Anggaran.

Sebuah Laporan keuangan yang berkualitas juga harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 71 Tahun 2010. Di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah (Suhardjo dan Adhi, 2013).

Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menghasilkan kualitas informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, maka diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, "Sistem pengendalian intem adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan"

Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengendalian Keuangan Daerah: "Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan".

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan diseluruh lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah. Sistem pengndalian intern pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, bahwa proses seluruh aktifitas audit, pemantauan, evaluasi, reviu, dan aktifitas pengecekan yang ada, melakukan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan rangka keyakinan yang memadai suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai pada tolak ukur dengan yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam kepemerintahan mewujudkan tata kelola yang baik disebut dengan Pengawasan Intern.

Seperti halnya Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu Instansi Pemerintahan, juga melakukan pelaporan keuangan yang harus dilaporkan kepada pemerintah. agar pelaksanaan pelaporan keuangan pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin andal dan tepat waktu haruslah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diikuti dengan penggunaan pengendalian intern yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Opini WTP atas laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan untuk meyakini informasi yang tercantum didalam LKPD tersebut. Pemberian opini BPK RI, khususnya opini WTP diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bermanfaat dalam menggambarkan kesesuaian pengelolaan keuangan dengan tata kelola terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu kepercayaan publik termasuk investor kepada pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunam terutama pada sektor prioritas daerah dan menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat (www.antaranews.com, 2017; 3/06/2019).

Berikut ini data hasil pemeriksaan BPK perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini:

> Tabel 1.1 Perkembangan LKPD Kabupaten Musi Banyuasin

Diri D Irabapaten Wasi Danyaasin
Opini BPK
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2010-2017, 2019

Dari tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten yakni sejak tahun 2010-2017. Hasil evaluasi BPK RI menunjukkan bahwa LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan oleh Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) . Diungkapkan oleh kepala BPKAD Musi Banyuasin Ir. H. Hendriadi kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKPD yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami atau berlatar pendidikan Akuntansi dan kurangnya pelatihan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) (www.mubaonline.com, 2017; 19/06/2020).

Penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Rasuli dan Haryani (2017) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Mokoginta, Lambey, & Pontoh (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian terdahulu mengenai standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Nopianti (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ikyarti dan Aprila (2019) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Sihite dan Holiawati (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin". Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan objek penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

#### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah yang di bahas adalah:

- 1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Secara Simultan dan Parsial?
- 2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Secara Simultan dan Parsial?
- 3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Secara Simultan dan Parsial?

#### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara simultan dan parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan dan parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan dan parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

 Bagi Badan Pengelolaan Kuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Diharapkan sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Instansi Pemerintah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance), dan mendapatkan gambaran dari pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Kuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Kuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk memecahkan masalah bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang serupa dimasa akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi dan Suhardjo 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual. Jurnal STIE Semarang. Vol.3, No.3.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery, 2014. Akuntansi Dasar 1 & 2. Cetakan Pertama. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan— edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Ikyarti, Tri dan Nila Aprilia, 2019. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Implementaasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupatn Seluma. Jurnal Akuntansi. 9(2).
- Kasmir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Katriana. 2019. Menkeu Ingin Laporan Keuangan Pemerintah Sehat. Dikutip dari http://www.antarnews.com.
- Kartikahadi, Hans. dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyadi. 2016 Sistem Akuntansi: Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. S. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberty.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keunagan Pemerintah". 874-890.
- Nopianti, Defi. 2017. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah". Bandung Business School.

- Sanjaya, Aditya, 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar). JOM Fekom. 4(1).
- Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2019 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

#### **Peraturan Pemerintah**

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. KSAP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun2016 Tentang Susunan Organisasi,Uraiantugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi.

- Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.